

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN DI DESA KAYUWI 1 KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT  
KABUPATEN MINAHASA**

**JESIKA WATUNG  
WELSON Y. ROMPAS  
DEYSI TAMPONGANGOY**

**ABSTRAK**

Keterbatasan infrastruktur di pedesaan, seperti penyediaan akses masuk ke sentra-sentra ekonomi, akses ke perkebunan maupun ketersediaan air bersih menjadi kendala-kendala dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Kayuwi 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, model data, dan verifikasi. Temuan penelitian ini mengacu pada lima indikator efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Tepat kebijakan, kebijakan pemerintah menyangkut permasalahan yang ada seperti pembuatan jalan produksi, penyediaan air bersih dan usaha produktif dapat terpecahkan. Tepat pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dilakukan secara berjenjang atau bertahap. Tepat target, sasaran pembangunan infrastruktur pedesaan adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin dan dalam pencapaian pemerintah telah menetapkan Desa Kayuwi 1 sebagai kelompok sasaran dengan melibatkan masyarakat. Tepat lingkungan, penilai yang lembaga yang terkait dalam pelaksanaan dan melibatkan masyarakat sebagai kelompok bahwa lembaga terkait maupun masyarakat sama-sama menilai positif terhadap program PPIP yang di laksanakan di Desa Kayuwi 1. Tepat proses, proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, sampai kepada pengambilan keputusan. Proses yang ada dapat berjalan dan PPIP di desa Kayuwi 1 Kawangkoan Barat berjalan sesuai proses yang ada.

**ABSTRACT**

*Limitation of infrastructure, such as providing access to economic centers, access to plantations and the availability of clean water, became the obstacle of the rural developing. This research uses a qualitative approach. Data obtained from interviews, observations, and documentation. The data obtained were then analyzed use data reduction techniques, data models, and verification. The focus of this study refer to five indicators of the effectiveness of implementing the rural infrastructure development program, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. Right on policy, government policies regarding existing problems such as construction of production roads, provide the clean water and productive businesses can be resolved. Appropriate implementation, the implementation of rural infrastructure development was carried out in stages or gradually. Right on target, the target of rural infrastructure development is to realize increased access for the poor and in this achievement the government has designated Kayuwi 1 as the target group by involving the community. Environmentally appropriate, assessment by institutions involved in implementation and involve the community as a group that related institutions and the community alike positively assess the PPIP program implemented in Kayuwi 1. Appropriate process, the process starts from planning, implementation, and supervision, to decision making. The existing process is working and PPIP in Kayuwi 1, West Kawangkoan is proceeding according to the existing process.*

*Keyword : programs effectiveness, infrastructure, rural development*

## PENDAHULUAN

Keterbatasan infrastruktur sudah menjadi masalah lama yang dihadapi oleh pedesaan terutama dalam pembangunan pedesaan. Masalah ketertinggalan infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia sendiri paling relatif banyak terdapat di pedesaan, khususnya desa terpencil dan tertinggal yang paling merasakan permasalahan ini (Giffried, dkk., 2019). Ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur di pedesaan mengakibatkan keterbatasan masyarakat desa dalam berkomunikasi, produksi dan mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan.

Akses fisik yang tidak layak menjadi salah satu contoh ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Akses fisik tersebut misalnya karena buruknya infrastruktur seperti jalan. Jaringan jalan yang buruk akan menghambat kegiatan masyarakat pedesaan ke sentra-sentra ekonomi. Jaringan jalan yang buruk akan menghambat kegiatan masyarakat pedesaan ke sentra-sentra ekonomi dan industri di sekitarnya. Akses menuju ke objek wisata juga menjadi terhambat, misalnya jalan menuju ke objek pariwisata Bukit Kasih Kanonang, Kawangkoan Barat yang melalui jalan Desa Kayuwi 1. Jaringan jalan yang buruk juga akan membatasi pemasaran produk yang dihasilkan. Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 No. 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Penanganan masalah infrastruktur sebaiknya ditangani berdasarkan kebutuhan dan ketepatangunaan. Maksud dari kebutuhan ialah, infrastruktur yang akan dibangun sebisa mungkin sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan nantinya akan terkait dengan masalah ketepatangunaan pada pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Apabila infrastruktur tersebut dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maka kegunaan dari pembangunan infrastruktur itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dapat di jalankan sesuai dengan yang menjadi rencana dari pemerintah.

Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk meninjau terealisasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPP) menjadi salah satu kebijakan tersebut. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPP) sudah berlangsung sejak Tahun 2007 sampai sekarang, namun belakangan ini karena PPIP adalah program yang berkelanjutan saat ini lebih dikenal sebagai Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang disebut juga dengan istilah (PPP). Program pembangunan infrastruktur pedesaan ini akan membuat masyarakat secara otomatis dapat mengetahui rencana dari pembangunan infrastruktur tersebut dan pelaksanaannya dapat di ketahui oleh masyarakat.

Keberhasilan penanganan infrastruktur merupakan hasil dari ketercapaian tujuan progra-program yang direncanakan dan dibuat. Tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan indikator suatu program berjalan dengan efektivitas yang baik (Berelson & Hasibuan, 2006). Semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, ataupun kegiatan (Mahmudi, 2005). Efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberap kriteria, misalnya produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan (Gibson, dkk., 2002). Tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses juga merupakan 5 tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi suatu program.

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan di desa Kayuwil Kec. Kawangkoan Barat, Kab. Minahasa, sejauh ini masih terbatas. Pemerintah hanya memfokuskan pembangunan yang bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat saat ini membutuhkan jalan untuk masuk ke akses perkebunan yang ada, serta pengadaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Namun sampai saat ini pemerintah belum menyediakan hal-hal yang diminta oleh masyarakat. Banyak juga program-program yang pelaksanaannya tidak tepat sasaran, tidak tepat pelaksanaan, karena kebijakan yang diambil juga tidak tepat atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kayuwil 1, Kecamatan Kawangkoan Barat.

Penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu, Giffried R. Rumoi, Burhanudin Kiay, Helly F. Kolondam (2019) Efektivitas pelaksanaan program pembangunan perdesaan. Masalah kurangnya infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia paling relatif banyak terdapat di perdesaan, khususnya desa terpencil dan tertinggal yang paling merasakan permasalahan ini. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan perdesaan dilihat dan pencapai tujuan. Dalam indikator pencapaian tujuan ada dua sub indikator juga yang perlu dilihat yang terdiri dari tepat waktu dan tepat target atau sasaran. Efektivitas program pembangunan infrastruktur dilihat dari indikator integrasi dari hasil temuan dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa pelaksanaan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, serta masyarakat juga sangat tertarik akan program tersebut mengingat untuk pembangunan desa Bulude juga untuk

kemajuan desa Bulude. Efektivitas program pembangun infrastruktur perdesaan dilihat dan indikator Adaptasi. Adapun pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan dimulai dari tahap perencanaan program melalui rapat dusun kemudian usulan masyarakat dirangkul dan dibawah kemusyawarah desa berikutnya dibawah ke musyawarah kecamatan sebelum melaksanakan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu rapatpra pelaksanaan kegiatan yang juga masyarakat dan tenaga kerja.

Naritza Mirlithia Karauwan, Alden Laloma, D. I Tampongangoy, (2016). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan UKM di dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah kota Manado. Pembahasan hasil penelitian dengan menyesuaikan indikator pengukuran efektivitas menurut Gibson (1984) yaitu, produksi efisiensi kepuasan, adaptasi dan pengembangan. Produksi merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluar utama dari organisasi. Berdasarkan penjelasan dan rangkuman wawancara, dalam poin produksi berdasarkan program-program pengembangan usaha kecil dan menengah .efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada penggunaan sumber daya yang langkah oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluar dari masukan.

Gerson Salomo Kolondam, Joorie M. Ruru, Very Y. Londa (2016). Efektivitas pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kelurahan Ranotana Kota Manado. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk

mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan.

Lingkan A. Rompas, Welson Y. Rompas, H. Kolondam (2020). Efektivitas program cerdascommand center Kota Manado E-government adalah salah satu upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel Partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan dari program cerdas command center agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan dapat lebih transparansi dan tidak akan menimbulkan berbagai indikasi yang negatif dari masyarakat.

Menurut Steers (1990) bahwa study tentang efektifitas biasanya di pusatkan pada dua faktor utama yang saling berhubungan, yaitu :

1. Faktor-faktor yang berfungsi membantu penyampaian tujuan yang hendak di capai, yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor internal yang membantu atau meramalkan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.
2. Faktor yang berkenaan dengan ukuran-ukuran seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan, faktor ini lazim di sebut kriteria efektifitas.

Berelson dalam Hasibuan (2006) mengartikan istilah *effectivity* atau *effectiveness* ini sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Sutrisno (2010 : 149) mengemukakan hal yang diperlukan untuk tercapainya efektifitas organisasi yang baik, Produksi (production) Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang

ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya.

Infrastruktur berarti wujud modal publik atau public capital sebagai bentuk investasi pemerintah dalam bentuk segala jenis fasilitas umum seperti jalan umum, sistem saluran pembuangan urum, jembatan untuk kebutuhan publik, dan sebagainya.

Menurut Sondang P. Siagian (2008) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

## **METEDOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Fokus penelitian menggunakan

indikator dari Riant Nugroho (2012) yang merupakan indikator efektifitas pembangunan infrastruktur, yaitu 1) tepat kebijakan; 2) tepat pelaksanaan; 3) tepat target; 4) tepat lingkungan; 5) tepat proses. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari 10 orang informan, yaitu: kepala satker PPIP Kabupaten Minahasa, Kepala Desa Kayuwi 1, Sekretaris Desa Kayuwi 1, Perangkat Desa Kayuwi 1 (2 orang), instansi Terkait, Masyarakat Desa Kayuwi 1 (3 orang). Data sekunder diperoleh dari arsip (*data documenter*) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari: Reduksi Data, Model Data, dan Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa

Kayuuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat adalah tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan programnya dan untuk membahas hal tersebut penulis menggunakan indikator efektivitas pelaksanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho (2012) yaitu :

1. Tepat Kebijakan, mencakup kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Minahasa guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kayuuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat.
2. Tepat Pelaksanaan, mencakup aktor-aktor pelaksanaan kebijakan tersebut dan pembagian tugas serta wewenangnya dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kayuuwi 1 yang ditetapkan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
3. Tepat Target, mencakup sasaran program pembangunan infrastruktur yang belum men capai target sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kayuuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat.
4. Tepat Lingkungan, mencakup interaksi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Kayuuwi 1 yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain hubungan antara masyarakat dengan para pelaksana kegiatan pembangunan tidak berjalan baik sehingga tidak jarang terjadi miss komunikasi.
5. Tepat Proses, mencakup pemahaman publik, repon publik, dan pelaksana terkait program pembangunan infrastruktur Desa Kayuuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat dalam proses pelaksanaan program atau kegiatan.

Dari berbagai macam indikator efektivitas implementasi program yang

diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho (2012). Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran efektivitas implementasi program yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Kayuuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Kelima indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator ini dirasa telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan publik dari dalam dan luar organisasi. Dalam pendapat Nugroho bahwa "Tepat Kebijakan" di sini adalah melihat bagaimana ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, kebijakan dilihat dari apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Kemudian tepat pelaksanaan, digunakan sebagai indikator efektivitas implementasi yang berkaitan dengan aktor implementasi kebijakan yang tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

Tepat target, yang dikemukakan oleh

Nugroho dalam hal pelaksanaan program infrastruktur di Desa Kayuwi 1, ditekankan pada kondisi masyarakat khususnya penerima manfaat dari program tersebut. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Keberhasilan program akan berhasil atau bahkan gagal tergantung dari para implementor yang memegang tanggung jawab tersebut.

Kemudian tepat lingkungan di sini ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik atau masyarakat Mengenai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Kayuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat.

Tepat proses yang terahir dikemukakan oleh Nugroho secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :

- 1) Policy acceptance. Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- 2) Policy adoption. Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

- 3) Strategic readiness. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Kayuwi 1 Kecamatan kawangkoan barat ditinjau dari lima indikator, menunjukkan ketepatan kebijakan yang sesuai masalah di masyarakatnya. Ketepatan pelaksanaannya sudah terkoordinasi baik dari pusat sampai desanya. Ketepatan sasaran program yang tertuju pada penyediaan akses infrastruktur bagi masyarakat miskin, hampir miskin, kaum perempuan, dan minoritas. Ketepatan proses yang berjalan baik dimuali dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, sampai kepada pengambilan keputusan. Ketepatan lingkungan dinilai positif oleh masyarakat terutama dalam pelaksanaan program PPIP.

### **Saran**

Agar sasaran program pembangunan infrastruktur pedesaan dapat diwujudkan maka pada kegiatan yang dilakukan hendaknya dapat memberdayakan masyarakat setempat sehingga masalah kemiskinan didesa dapat teratasi. Guna menjaga kesinambungan pelaksanaan program PPIP di Desa maka kepada di Desa maka kepada pemerintah serta unsur pelaksana lainnya disarankan agar tetap menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan memberikan kewenangan kepada mereka untuk menjaga dan merawat apa yang telah dikerjakan atau dilaksanakan. Setiap proses yang ada harus tetap pada porsinya agar segala program yang PPIP berjalan sesuai proses yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gibson. 2002. *Organizational Behavior Stonetur*, Proce New York M C Grow Hill.
- Giffried, R., Rumoia, Burhanudin K., Helly F., Kolondam. 2019. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan (studi:Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik*. 5(74).
- Hasibuan. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta Bumi Aksara.
- Karauwan mirlithia naritza, Alden 2017. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan UKM di Dinas Koperasi dan usaha kecil dan menengah kota Manado. *Jurnal administrasi publik*. 3(046)
- Kolondam, salomo, kolondam, ruru M., Joorie, londa. Y., Very. 2016. Efektivitas pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kelurahan Ranotana Kota Manado. *Jurnal administrasi publik*. 2(029)
- Kurniawan. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Depok DIA Fisip UI.
- Nugroho, Rian. 2012. *Public Policy Jakarta*. PT. Elex Media Komputindo.
- Rompas Anggreiny L., Rompas W., Kolondam H. Efektivitas program cerdas command center kota manado. *Jurnal administrasi public*. 2020. 6(89)
- Richard, M. Steers. 2005. *Efektivitas Organisasi diterjemahkan Magdalena Junin*. Erlangga Jogyakarta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta Penerbit Kencana.
- Siagian, S. P. 2001. *Manajemen Sumber*

*Daya Manusia*. Jakarta Bumi Aksara

Siagian, S. P. 2008. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Jakarta Bumi Aksara

## Sumber lain.

Pasal 1 No. 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional